

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan hasil dari pengolahan data mengenai penelitian peran sektor pertambangan mineral terhadap perekonomian regional di Provinsi Jawa Barat yang meliputi : analisis keterkaitan hulu dan keterkaitan hilir, analisis terhadap kebutuhan ekonomi wilayahnya, analisis terhadap transaksi domestik dan kesempatan kerja wilayahnya, serta analisis terhadap distribusi pendapatan ekonomi wilayahnya. Selain itu juga model peramalan proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 sektor pertambangan mineral akan menunjukkan angka pertumbuhan pendapatan ekonomi ke tahun peramalan sehingga akan menarik minat para investor untuk berinvestasi dalam bidang pertambangan mineral.

5.1 Peran Sektor Pertambangan Mineral Di Provinsi Jawa Barat Terhadap Perekonomian Regional

5.1.1 Analisis Keterkaitan Hulu (α_j) dan Keterkaitan Hilir (β_i)

Dari analisis Tabel I-O Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 secara regional dengan mengacu pada perhitungan agregat (23 x 23 Sektor) hasil pengolahan data yang menyatakan hubungan keterkaitan hulu (α_j) dan keterkaitan hilir (β_i) dari masing-masing sektor. Dimana sektor pertambangan mineral, keterkaitan hulu atau disebut sebagai keterkaitan kebelakang dan keterkaitan hilir masing-masing sebesar 0,6954 dan 0,7632, menunjukkan nilai <1 , dengan peringkat masing-masing yaitu peringkat 21 untuk keterkaitan hulu dan peringkat 14 untuk keterkaitan hilir, sehingga sektor tersebut perlu input primer yang dapat mendukung kegiatan transaksi untuk

meningkatkan $\alpha_j > 1$ dan $\beta_i > 1$. Sementara sektor yang memiliki nilai dan peringkat unggulan pada keterkaitan hulu yaitu sektor Industri gelas dan barang dari gelas dan sektor industri tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki, pada keterkaitan hilir yaitu sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor barang jadi dari logam. Kedua sektor tersebut menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan antarsektor yang saling mendukung dalam proses transaksi domestik untuk menghasilkan nilai tambah secara optimal. Namun sektor industri sangat memerlukan peran sektor pertambangan mineral sebagai barang baku untuk meningkatkan nilai tambah sehingga banyak digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Adapun timbal balik dari sektor pengolahan industri tersebut terhadap sektor pertambangan mineral untuk menunjang kegiatan produksi penambangan, infrastruktur dan kebutuhan lainnya dalam proses tersebut. Ada beberapa sektor yang mendukung peningkatan nilai tambah dan penggunaan dari sektor pertambangan mineral yaitu sektor listrik, gas, air bersih, dan sektor bangunan/konstruksi dan sektor jasa-jasa. Dengan demikian nilai tambah sektor tersebut dapat meningkat sehingga banyak digunakan oleh sektor di antaranya adalah sektor pengolahan industri, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, pertanian (zeolit untuk penjernih air, untuk pupuk, dll), dan sektor listrik, gas dan air bersih.

Pada Tabel 4.3 dalam bab pengolahan data, total input antarsektor Provinsi Jawa Barat dari komponen upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, pajak tak langsung, subsidi dan nilai tambah bruto, komponen yang paling besar yaitu nilai tambah bruto yaitu Rp. 2.476.870 (milyar rupiah) atau sebesar 44,05 % (persen) artinya bahwa sektor tersebut memberikan pendapatan ekonomi yang tinggi. Komponen kedua terbesar yaitu surplus usaha sebesar Rp. 1.475.026 (milyar rupiah) atau sebesar 26,23 % persen yang artinya cukup banyak investasi yang masuk

untuk usaha di sektor pertambangan mineral sebagai keuntungan yang didapat untuk melaksanakan kegiatan produksi selanjutnya guna meningkatkan nilai tambah sehingga memicu peningkatan pendapatan ekonomi. Komponen upah dan gaji serta penyusutan yang masih rendah nilainya masing-masing sebesar Rp. 679.868 atau 12,09 % (persen) dan Rp. 214.825 atau 3,82 % (persen) artinya upah yang diterima oleh pekerja sektor tersebut sebesar Rp. 679.868 dan impor mengalami penyusutan dengan pajak tak langsung sebesar Rp. 107.151 (milyar rupiah) atau sebesar 1,91 % (persen) yang relatif kecil serta tidak adanya subsidi.

Selanjutnya, total output atau penggunaan sektor pertambangan mineral sebesar Rp. 6.637.928 (milyar rupiah). Dari total output tersebut, total input primer yang digunakan untuk input antara di daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 668.829 (milyar rupiah) atau 11,90 % (persen). Total output tersebut terdiri dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor. Dalam hal ini komponen yang paling besar jumlahnya adalah ekspor, artinya penggunaan tersebut telah banyak diekspor keluar daerah untuk menunjang kegiatan transaksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik itu untuk pengembangan sektoral maupun wilayah di Provinsi Jawa Barat. Sebesar Rp. 114.472 (milyar rupiah) atau 98,94 % (persen). Kemudian penggunaan kedua terbesar adalah rumah tangga, yang artinya banyak penggunaan secara langsung dari barang jadi tambang mineral yang digunakan untuk kegiatan masyarakat seperti pembangunan jalan, rumah, jembatan, alat rumah tangga dan lainnya. Untuk pembentukan modal tetap bruto yang masih sedikit yaitu Rp. 2.300 (milyar rupiah) atau 0,03 % (persen), artinya pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dalam negeri untuk proses produksi yang dipakai berulang-ulang dengan batas umur pemakaian satu tahun atau lebih masih sedikit dan perubahan sebesar Rp. -58.960 atau -0,89 % (persen), artinya

perubahan barang inventori yang belum terpakai atau belum selesai diproses maupun belum terjual mengalami pengurangan sebesar Rp. 58.960 (milyar rupiah) tanpa adanya subsidi.

Pada Tabel 4.4 dalam bab pengolahan data, penggunaan sektor pertambangan mineral yang paling besar yaitu oleh sektor bangunan/konstruksi dan sektor industri kimia, barang dari bahan kimia, karet dan plastik yang masing-masing sebesar Rp. 1.412.970 (milyar rupiah) atau 21,28 % (persen) dan Rp. 3.107.943 (milyar rupiah) atau 46,82 % (persen). Sektor bangunan/konstruksi sangat bergantung daripada sektor pertambangan mineral sebagai pelaksanaan pengembangan wilayah dan pemenuhan sarana/prasarana untuk menunjang kegiatan program pemerintah daerah. Begitu pula pada sektor industri kimia, barang dari bahan kimia, karet dan plastik yang sangat mengandalkan sektor pertambangan mineral sebagai memenuhi kebutuhan petrokimia, produk dari plastik dan karet serta bahan campuran kimia untuk obat-obatan, bahan baku semen, dan pupuk kimia.

5.1.2 Analisis Pengganda Ekonomi

Selanjutnya, pada analisis penggandaan ekonomi antarsektor pada agregat (23 x 23 sektor) Tabel I-O Provinsi Jawa Barat tahun 2010 memiliki nilai yaitu (>1), bahwa koefisien teknik tersebut semua sektor yang ada dalam model I-O memiliki jumlah permintaan input dan output yang saling berkaitan antar sektor sehingga total output yang dihasilkan meningkat jumlahnya. Pengganda ekonomi sektor pertambangan mineral yang terdiri dari : output, investasi, tenaga kerja, pendapatan, nilai tambah dan surplus.

Untuk pengganda output, sektor pertambangan mineral sebesar 1,5367 yang artinya setiap kenaikan pengeluaran sebesar Rp. 1 juta rupiah maka akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp. 1,5367 juta rupiah dimana nilai tersebut

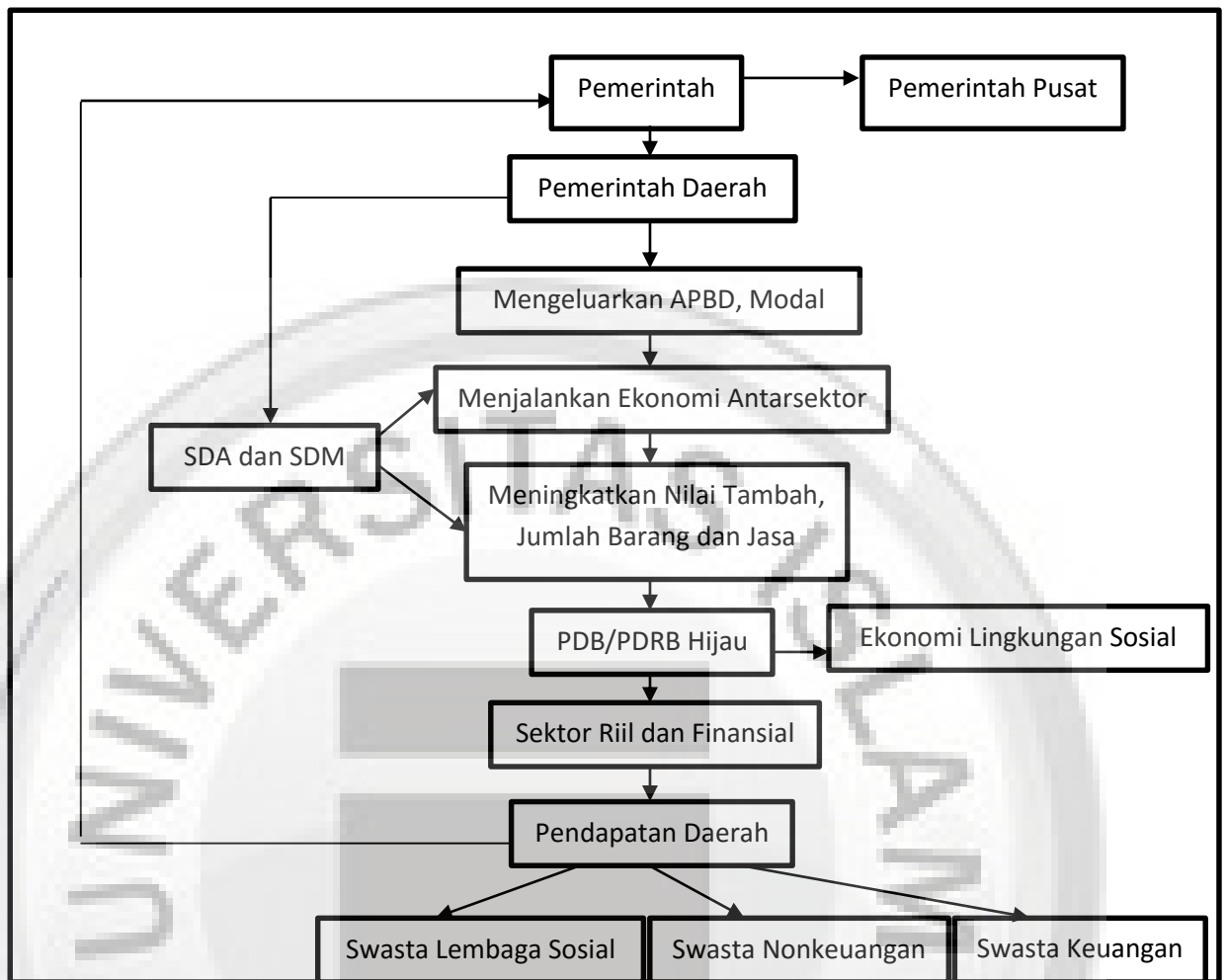
masih relatif kecil dibandingkan sektor sekunder yaitu listrik, gas kota dan air bersih serta sektor pengolahan industri tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki.

Untuk pengganda investasi, sektor tersebut sebesar 1,2552 yang artinya setiap kenaikan pengeluaran sebesar Rp. 1 juta rupiah maka akan meningkatkan investasi sebesar Rp. 1,2552 juta rupiah. Untuk pengganda kesempatan kerja sektor tersebut sebesar 1,2749 yang artinya setiap kenaikan pengeluaran Rp. 1 juta rupiah akan meningkatkan kesempatan tenaga kerja sebesar Rp. 1,2749 juta rupiah. Selanjutnya untuk pengganda pendapatan sebesar 1,3442 dimana setiap kenaikan pengeluaran Rp. 1 juta rupiah maka akan meningkatkan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1,3442. Untuk pengganda nilai tambah sebesar 1,2700 dimana bila kenaikan pengeluaran sebesar Rp. 1 juta rupiah maka akan meningkatkan jumlah nilai tambah sebesar Rp. 1,2700 juta rupiah dan pengganda surplus sebesar 2,1578 artinya apabila kenaikan pengeluaran Rp. 1 juta rupiah maka akan meningkatkan jumlah surplus usaha sebesar Rp. 2,1578 itu artinya surplus usaha tersebut memberikan peluang para investor untuk berinvestasi pada sektor pertambangan mineral sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan per kapita.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap di Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dalam mencari mitra usaha guna membentuk kerjasama baik antardaerah didalam negeri maupun dengan daerah-daerah negara tetangga di luar negeri. Nilai ukur tersebut berdasarkan keterkaitan hulu dan keterkaitan hilir sebagai acuan untuk meningkatkan nilai tambah setiap sektornya agar terciptanya interaksi yang saling memberikan manfaat antarsektor di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut bergantung pada difusi sumber daya yang meliputi: faktor-faktor kapital, tenaga kerja, komoditas primer atau material, informasi dan teknologi serta mata dagang yaitu komoditas dan jasa yang memadai. Daerah tersebut perlu adanya spesifikasi atau

patokan untuk sektor unggulan, sehingga diperoleh nilai tambah yang optimal untuk konsep pengembangan wilayah yang lebih maju.

Pemerintah pusat berwenang untuk menyelenggarakan segala urusannya yang bersifat nasional, sedangkan pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan tugasnya di daerah tertentu. Pemerintah daerah mengeluarkan Anggaran Belanja Daerah dan modal untuk dapat menjalankan transaksi antarekonomi pada daerah tertentu yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan nilai tambah guna menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi langsung maupun sebagai bahan baku campuran pada industri lainnya, sehingga anggaran pendapatan yang masuk akan di salurkan pada lembaga swasta sosial, swasta keuangan dan swasta nonkeuangan sebagai Pendapatan Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Untuk dapat mengoptimalkan pendapatan yang diterima, maka pemerintah daerah harus meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan cara : membangun sarana/prasarana untuk layanan publik yang memadai, mencari informasi mengenai potensi yang dimiliki setiap daerah untuk mengeksport sumber daya alam yang dimiliki, menanggulangi bencana sosial maupun bencana alam sebagai sumber keuangan lokal, dan mengumpulkan pajak-pajak potensial sehingga pemerintah daerah tidak bergantung pada transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berikut disajikan alur keterpaduan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan ekonomi daerah pada Gambar 5.1 di bawah ini.



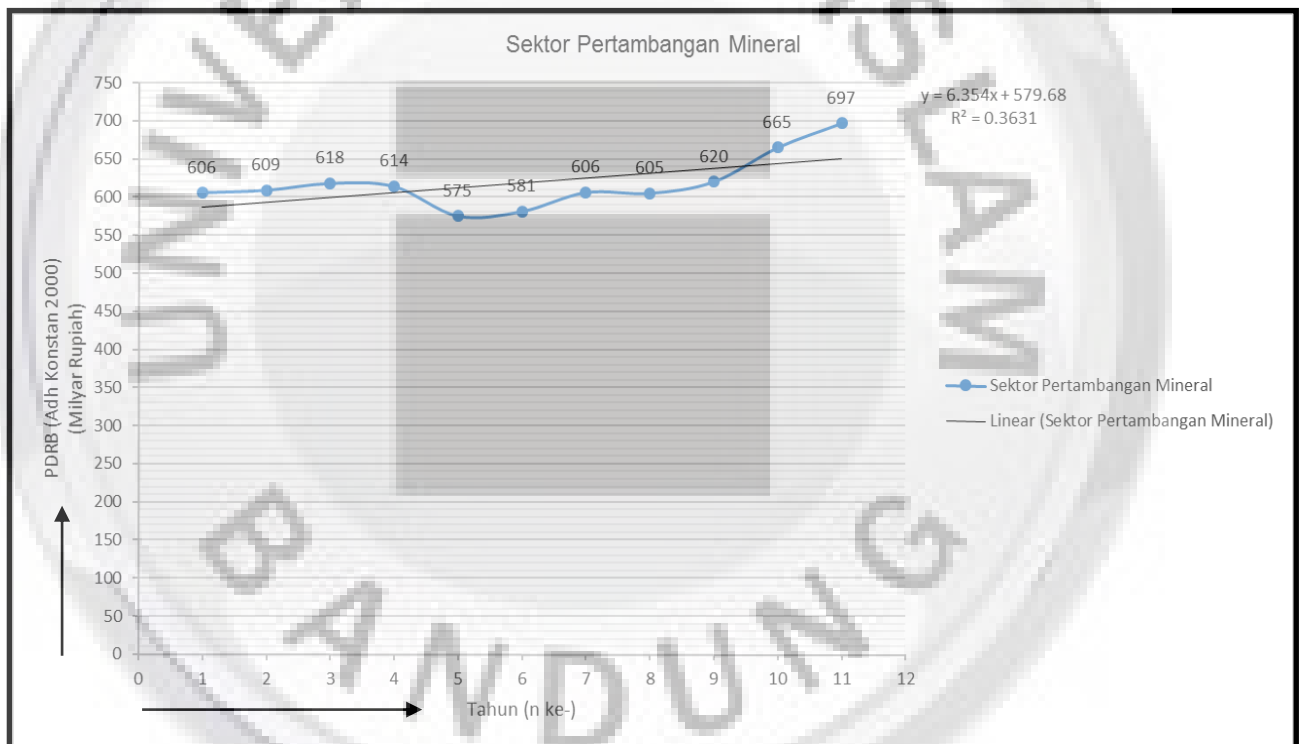
Sumber : Anonim (s), Tahun 2000, *Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom*, Badan Pusat Statistik

Gambar 5.1
Alur Keterpaduan Kebijakan Ekonomi Daerah

5.1.3 Kontribusi Sektor Pertambangan Mineral

Dari acuan data Tabel I-O Provinsi Jawa Barat tahun 2010, pada nilai tambah bruto sektor pertambangan mineral yang diinterpretasikan kedalam bentuk data PDRB Provinsi Jawa Barat atas dasar harga berlaku (Adhb) menurut lapangan/usaha tahun 2003 s/d tahun 2013 maka akan diketahui laju pertumbuhan PDRB tersebut setiap tahunnya yang mengalami perubahan naik dan turunnya nilai PDRB tersebut. Peran kontribusi sektor pertambangan mineral dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mengalami kenaikan yang begitu signifikan pada tahun 2013 terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 697 (satu milyar rupiah).

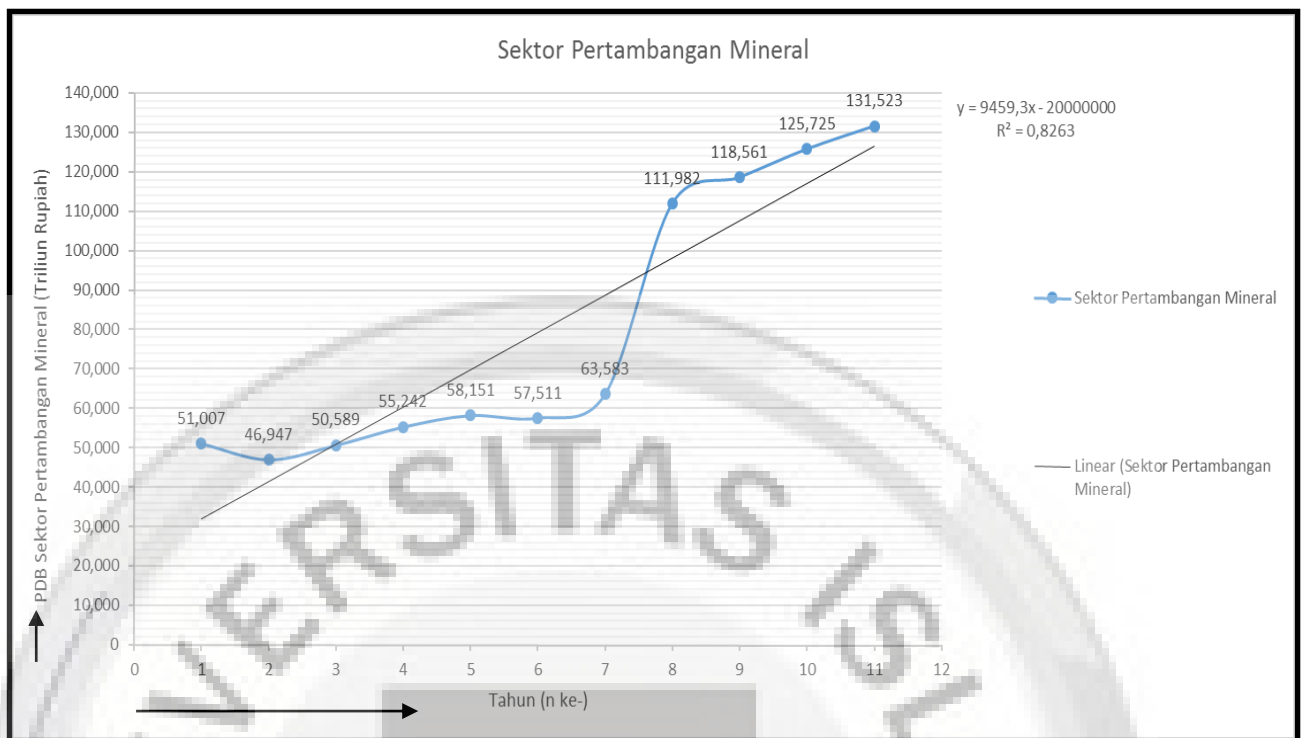
Pada tahun 2007 mengalami penurunan angka PDRB sebesar Rp 39 (milyar rupiah) dari tahun sebelumnya. Berdasarkan perubahan nilai dari tahun ke tahunnya seiring berjalan waktu sektor tersebut mengalami peningkatan hingga akhir tahun pengamatan 2013 yang begitu signifikan. Hal tersebut dapat berpeluang besar bagi pertumbuhan ekonomi sektor tersebut dalam peningkatan nilai tambah dan surplus usaha sehingga meningkatkan distribusi pendapatan ekonomi di Provinsi Jawa Barat serta meningkatkan penggunaan produk sektor tersebut untuk di ekspor ke daerah lainnya.



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Gambar 5.2
Grafik Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Mineral
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Dari Tahun 2003-2013 Provinsi Jawa Barat

Pada Gambar 5.3 di bawah, menunjukkan grafik pertumbuhan PDB sektor pertambangan mineral nasional yang juga relatif tidak stabil, terjadi penurunan pada tahun 2009 dan melonjak naik pada tahun 2010 sebesar Rp. 111.982 (Milyar rupiah).



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Gambar 5.3
Grafik Pertumbuhan PDB Sektor Pertambangan Mineral
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Dari Tahun 2003-2013 Provinsi Jawa Barat

5.1.4 Dana Pemerintah Pusat dan Daerah

Dari data realisasi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013, dana PAD (pendapatan asli daerah) lebih kecil dari DAU (dana alokasi umum) karena DAU sebagai dana penerimaan untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung dimana masing-masing dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan program belanja pegawai, barang, jasa dan modal untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk melaksanakan kegiatan belanja pegawai, subsidi, bunga, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja keuangan dan belanja tak terduga, sedangkan PAD tidak mempengaruhi belanja langsung.

Untuk belanja langsung, PAD tetap berpengaruh, namun pemerintah daerah harus berupaya memaksimalkan PAD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas layanan publik. Semakin besar PAD

maka besar pula belanja daerah untuk meningkatkan layanan publik. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, PAD harus tetap dioptimalkan dari sektor pajak, retribusi pengelolaan kekayaan daerah dan lain pendapatan asli daerah yang sah melalui pelayanan publik. Selanjutnya untuk belanja operasi, PAD harus tetap dioptimalkan dengan cara menggali potensi sumber daya alam daerah. Untuk belanja modal, PAD tetap harus diptimalkan dengan cara memenuhi biaya rutin untuk pelayanan publik contohnya mengadakan infrastruktur yang memadai. Untuk belanja transfer dan tak terduga, PAD juga tetap dioptimalkan dengan cara melaksanakan program pemerintah contohnya penanggulangan bencana alam untuk sumber keuangan lokal dan berupaya untuk tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan cara mengumpulkan pajak-pajak potensial.

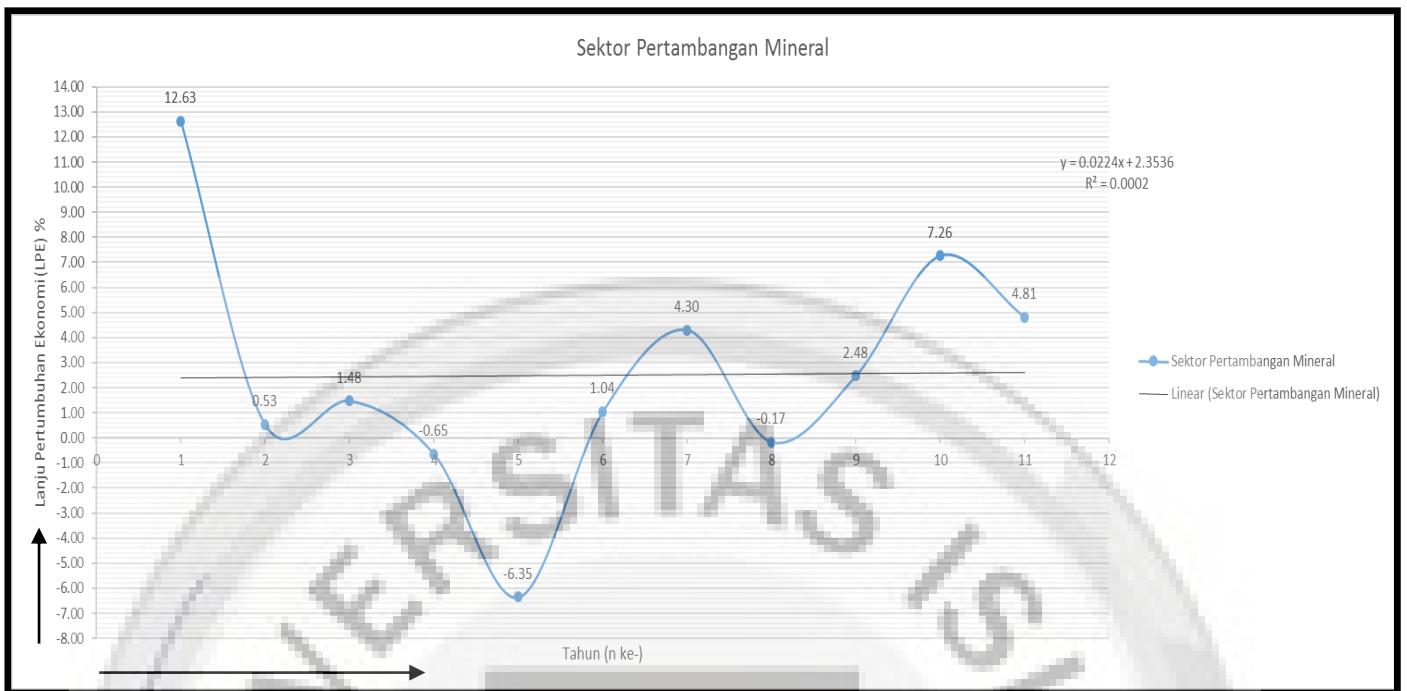
Sementara pengaruh DAU sangat mempengaruhi belanja langsung dan tidak langsung yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) yang merupakan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah pusat. Sehingga sebisa mungkin PAD dioptimalkan karena masih kurangnya pengelolaan sumber daya atau kekayaan di daerah berpotensi yaitu Provinsi Jawa Barat sehingga kemampuan daerah untuk pelayanan publik diharapkan dapat dioptimalkan dan tidak bergantung pada transfer dari pusat.

5.2 Peran Sektor Pertambangan Mineral Terhadap Kebutuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Untuk memperoleh pendapatan daerah ternyata hampir seluruh sektor di Provinsi Jawa Barat mengandalkan sektor primer dan sektor sekunder, diantara sektor primer adalah sektor pertanian, perkebunan, perhutanan dan perikanan dan sektor pertambangan mineral, serta sektor sekunder yaitu industri pengolahan seperti industri barang tekstil dan barang jadi dari logam, listrik, gas kota dan air bersih. Oleh

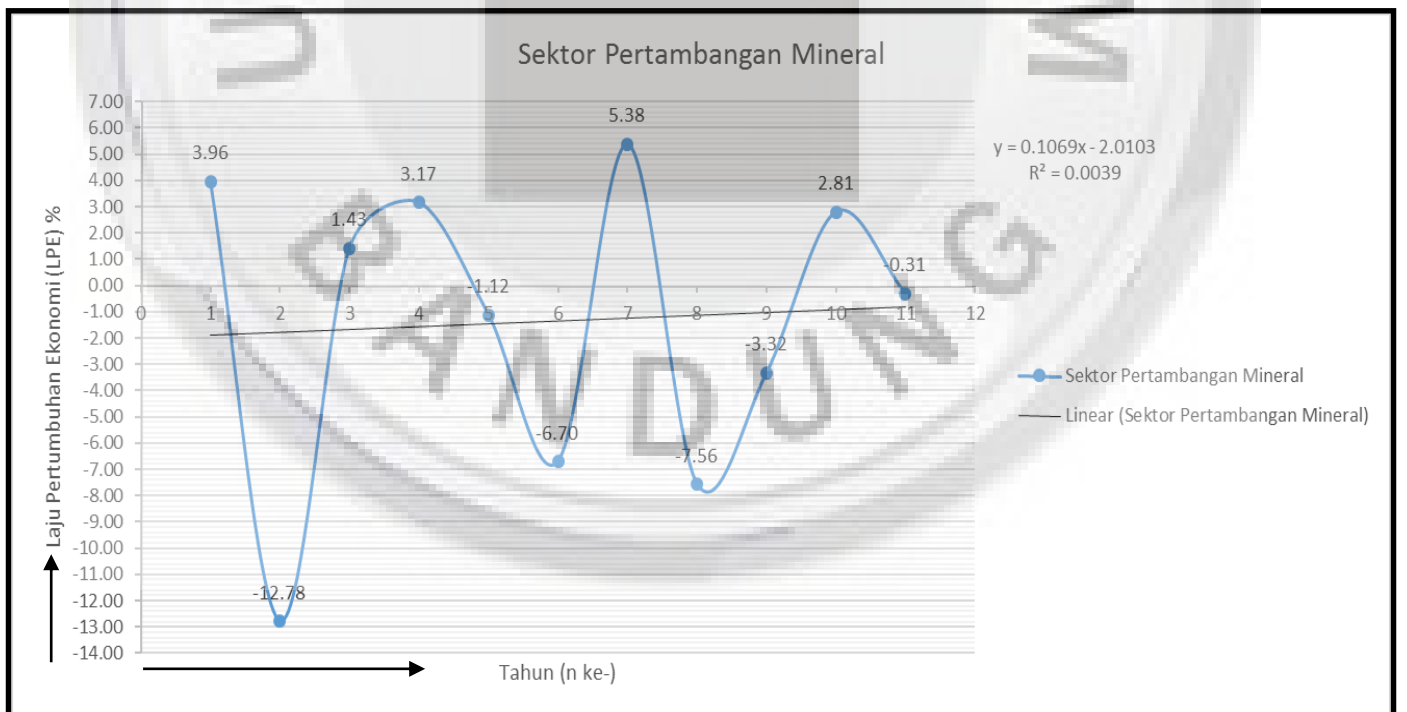
karena itulah perlu mengembangkan sektor tersier untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut dengan meningkatkan nilai tambah dan menciptakan sebanyak mungkin pekerjaan di sektor tersebut seperti sektor bangunan/konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Pada tahun 2003-2013, distribusi PDRB sektor pertambangan mineral (Adh Konstan Tahun 2000) walaupun secara lambat dan mengalami penurunan dari tahun 2004, hal itu disebabkan jumlah produksi yang terus meningkat namun distribusi terhadap Provinsi Jawa Barat yang dilakukan tidak optimal. Selain itu juga Provinsi Jawa Barat mempunyai laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang relatif tidak stabil, hal ini ditunjukkan dari tahun 2004 yaitu -0,65 % (persen), penurunan kembali di tahun 2005 sebesar -6,35 % (persen) dan menurun kembali di tahun 2008, selanjutnya kenaikan pada tahun 2009 dan 2010 yang signifikan sebesar 2,48 % (persen) dan 7,26 % (persen). Hal ini menunjukkan bahwa produksi dari hasil sektor primer dan sekunder lainnya tidak dilakukan secara optimal dan penurunan nilai tambah produk yang signifikan. Dengan demikian melalui konsep pengembangan tersebut dilakukan antara lain adanya kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet) yang ada di masing-masing Provinsi dengan antarsektor unggulan tertentu. Provinsi Jawa Barat memiliki pengembangan Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang merupakan kawasan yang cukup tertinggal dari segi perekonomiannya sehingga perlu kerjasama dengan kawasan andalan seperti pulau Sumatera yang terdapat 1 Kapet dan 9 kawasan yaitu : Banda Aceh, Medan, Batam, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu dan Bandar Lampung sedangkan Pulau Jawa adalah Cilegon, Jabotabek, Purwasuka, Bandung Raya, Semarang dan Gerbangkertasusila. Berikut disajikan grafik laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan mineral pada Gambar 5.4 dan Gambar 5.5 di bawah ini.



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Gambar 5.4
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Dalam Persen)
Sektor Pertambangan Mineral Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Dari Tahun
2003-2013 Provinsi Jawa Barat



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Gambar 5.5
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Dalam Persen)
Sektor Pertambangan Mineral Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Dari Tahun
2003-2013 Nasional

Pada grafik laju pertumbuhan ekonomi nasional sektor pertambangan mineral yang tidak stabil, terjadi penurunan yang drastis di tahun 2004 dan melonjak naik di tahun 2005 sebesar 1,43 % (persen). Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2008 dan melonjak naik di tahun 2009 sebesar 5,38 % (persen). Pada tahun 2010 mengalami penurunan kembali dan meningkat di tahun 2012 sebesar 2,81 % (persen). Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional tidak stabil.

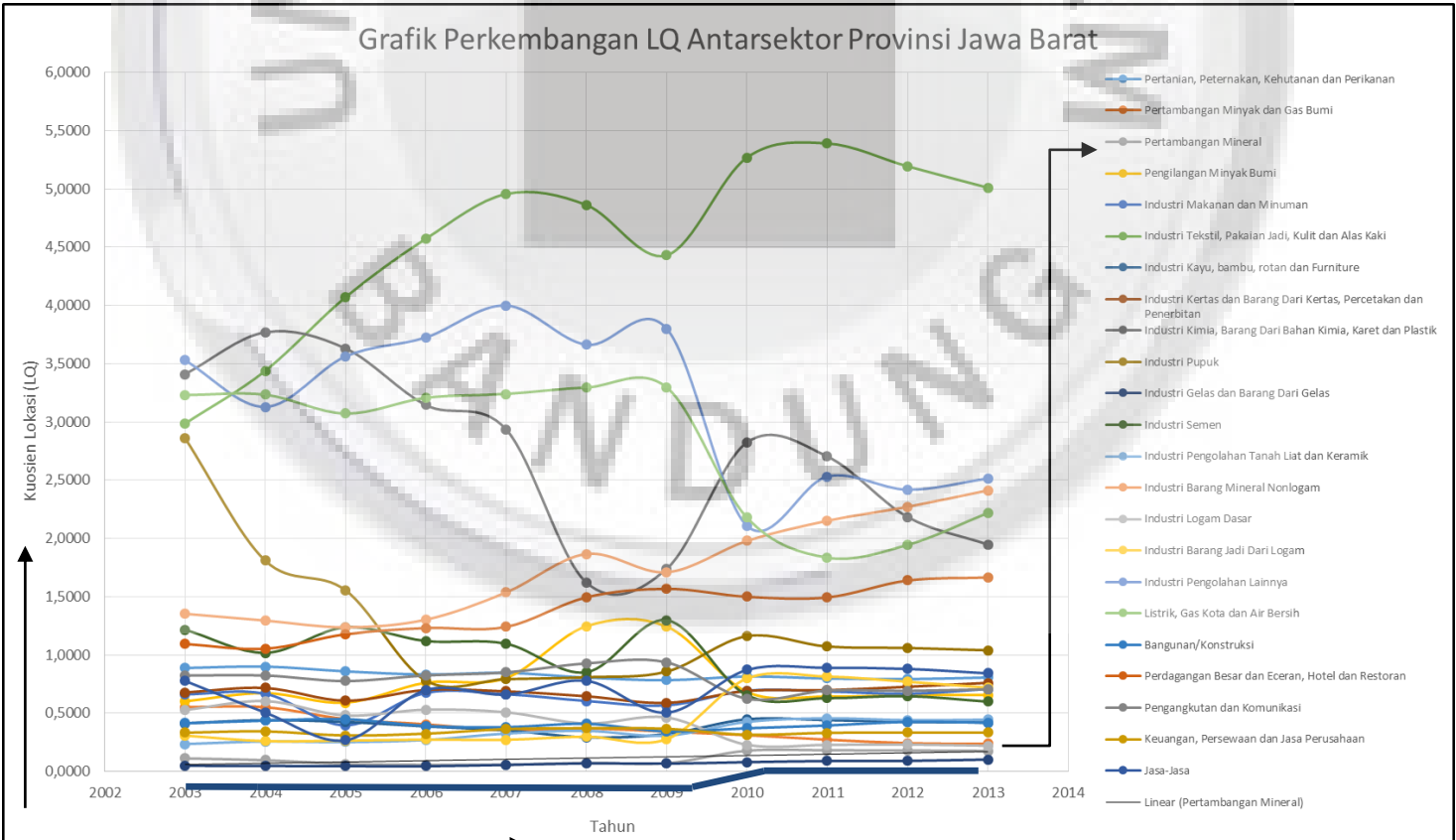
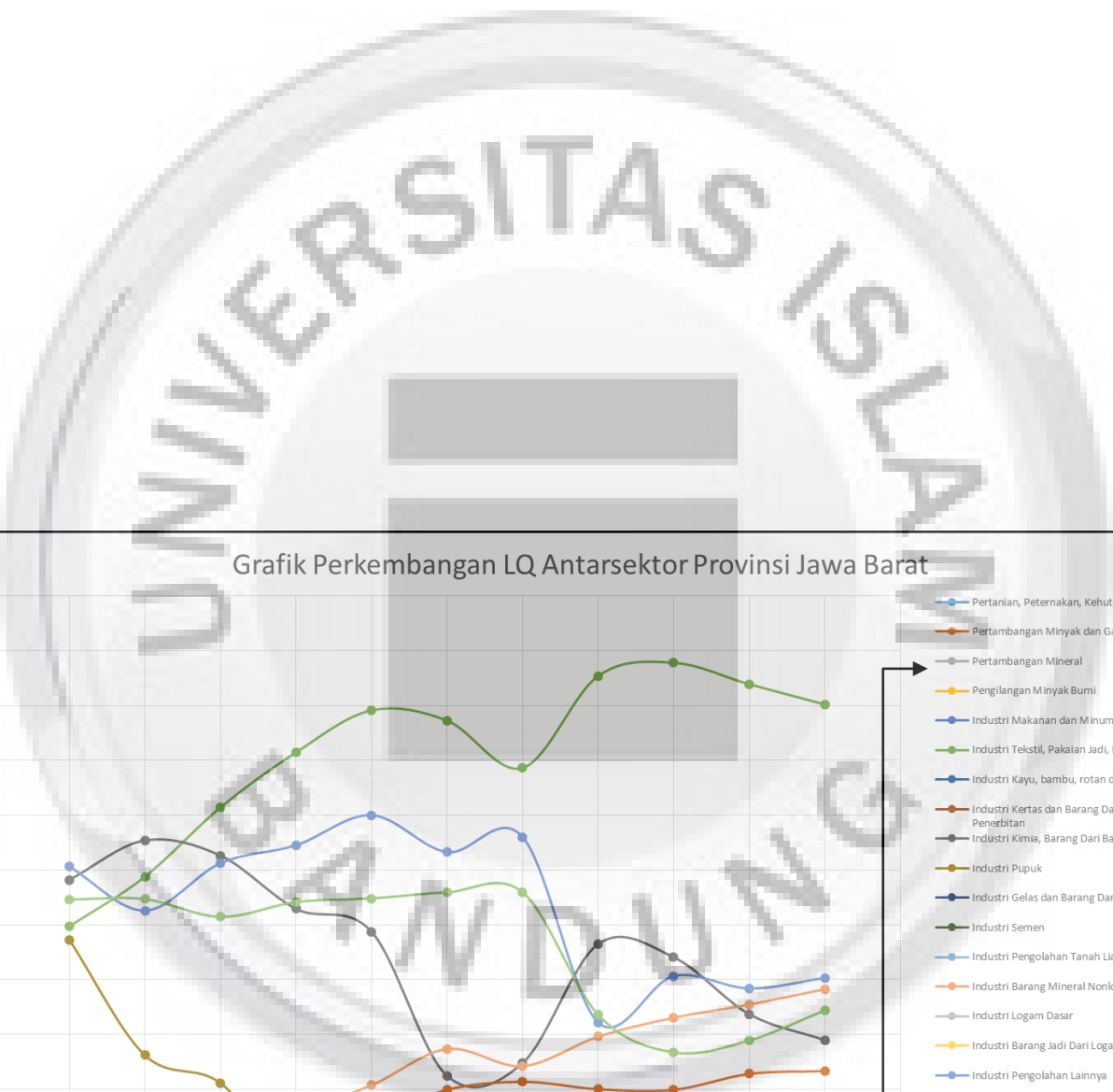
Untuk lebih mengikuti gerak kemajuan jaman dalam pembangunan, maka program pembangunan melalui kawasan andalan tersebut harus dikaitkan dengan ekonomi subregional. Sehingga diharapkan interaksi dengan negara-negara tetangga juga diperoleh suatu alur wilayah yang komplementer atau saling melengkapi. Dalam hal itu perlu tokoh yang berperan seperti pemerintah dan swasta untuk menjalin kerjasama dengan subregional di wilayah kawasan segitiga pertumbuhan yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Negara tetangga. Swasta sebagai pelaksana kerjasama sedangkan pemerintah sebagai fasilitator. Program tersebut antara lain : perdagangan, investasi, industri, keuangan, bea cukai, turisme, perhubungan laut dan transportasi darat, perhubungan udara, telekomunikasi, pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas orang, pertanian dan perikanan serta energi yang harus dikelola pemerintah dan swasta secara optimal dan pengawasan yang ketat.

Selanjutnya nilai kuosien lokasi (LQ) antarsektor Provinsi Jawa Barat sebagai peran sektor pertambangan mineral terhadap kebutuhan ekonomi yaitu dalam hal mengekspor produk sehingga adanya keterkaitan pemenuhan kebutuhan daerah tersebut dan daerah lainnya. Dengan analisis LQ dari tahun 2003-2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Adhb) sektor pertambangan mineral Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata sebesar 0,1143 atau $LQ < 1$. Maka hasil analisis tersebut menunjukkan

bahwa sektor pertambangan mineral belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah Provinsi Jawa Barat sehingga perlu impor antarsektor dari daerah lain untuk menunjang kegiatan transaksi bagi kemajuan perekonomian regional.

Peran sektor pertambangan mineral tersebut yang relatif masih kecil dibandingkan dengan antarsektor ekonomi lainnya di Provinsi Jawa Barat maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan daerah untuk melaksanakan program pembangunan wilayah yang telah dijelaskan sebelumnya untuk meningkatkan sarana/prasarana publik, peningkatan nilai tambah untuk menarik minat investor dan meningkatkan ekspor dalam mengembangkan usaha sektor pertambangan mineral.

Peran LQ terbesar menurut lapangan/usaha di Provinsi Jawa Barat yaitu sektor industri tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki sebesar 4,56, kemudian sektor industri pengolahan lainnya sebesar 3,18. Hal itu terjadi karena adanya ketimpangan distribusi PDRB yang tidak merata antarsektor sehingga adanya sektor dominan yang lebih maju ketimbang sektor pertambangan mineral yang kecil perannya dalam memenuhi kebutuhan daerah skala regional. Upaya dalam peningkatan nilai LQ tersebut dengan optimalisasi nilai tambah dari jumlah input primer yang ditingkatkan pada sektor pertambangan mineral sehingga meningkatkan PDRB. Selanjutnya perlu daerah dominan yang menjadi tolak ukur pemenuhan kebutuhan daerah agar lebih meningkatkan jumlah ekspor untuk daerah-daerah yang lebih membutuhkan sehingga terjadi pemerataan distribusi penggunaan produksi dan meningkatkan perekonomian sektor pertambangan mineral. Dapat dilihat pada grafik perkembangan kuosien lokasi (LQ) pada Gambar 5.6 di bawah ini.



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Gambar 5.6
Grafik Perkembangan Kuosien Lokasi (LQ) Antarsektor Ekonomi Provinsi Jawa Barat

5.3 Peran Sektor Pertambangan Mineral Di Provinsi Jawa Barat Terhadap Transaksi dan Kesempatan Kerja Wilayah Regional

Model analisis yang dipakai pada tingkat kesempatan kerja suatu wilayah di Provinsi Jawa Barat menggunakan analisis *Shift-Share* (SSA) dengan komponen perhitungan yang terdiri dari perhitungan nilai R_a , R_i dan r_i , pertumbuhan ekonomi dan pergeseran bersih (PB) menurut lapangan/usaha di Provinsi Jawa Barat.

Untuk sektor pertambangan mineral nilai perubahan PDRB pada Tabel 4.16 sebesar Rp. 2.694 (milyar rupiah) dari tahun sebelumnya, sehingga didapat hasil perhitungan komponen pertumbuhan ekonomi pada Tabel 4.17 sebesar 4,4529, artinya nilai tersebut akan menerangkan bahwa terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kemudian untuk mencari nilai pergeseran bersih dibutuhkan perhitungan KPP dan KPPW yang masing-masing dihitung menurut nilai pertumbuhan ekonomi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui perubahan tenaga kerja atau produksi di suatu wilayah antara tahun dasar dengan tahun akhir analisis dibagi menjadi 3 (tiga) komponen perbandingan yaitu nilai KPP, KPPW dan KPN. Nilai KPN yaitu perubahan pertumbuhan nasional sebesar 0,9082. Nilai KPP sektor tersebut adalah (-0,5749) atau $KPP < 0$, menyatakan bahwa sektor pertambangan mineral mengalami pertumbuhan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tingkat nasional. Untuk nilai KPPW sektor tersebut sebesar 4,1196 atau $KPPW > 0$, menyatakan bahwa sektor pertambangan mineral memiliki daya saing yang baik dibandingkan pada tingkat nasional yang dapat dikatakan bahwa sektor tersebut memiliki kesempatan menjadi sektor unggulan.

Nilai pergeseran bersih (PB) di sektor pertambangan mineral Provinsi Jawa Barat pada Tabel 4.17 sebesar 3,5447 itu artinya nilai pergeseran bersih (PB) > 0 , sehingga termasuk kedalam kategori pertumbuhan kinerja dan kesempatan kerja yang progresif atau sektor yang maju, namun masih kalah bersaing dengan sektor

primer seperti : sektor pengilangan minyak, dan sektor tersier seperti : pengangkutan dan komunikasi (>PB sektor pertambangan mineral) di Provinsi Jawa Barat.

Untuk meningkatkan kondisi potensi kesempatan kerja dan pertumbuhan transaksi yang lebih cepat di sektor pertambangan mineral dilakukan dengan menambah prasarana/sarana publik untuk mempermudah informasi sumber daya potensial, menambah infrastruktur untuk menunjang kegiatan proses produksi dan transaksi, serta peran pemerintah pusat dan daerah yang lebih ditingkatkan sebagai fasilitator/penyedia modal usaha antardaerah, menambah kualitas sumber daya manusia dengan mendorong inovasi masyarakat setempat untuk meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi antarsektor terbelakang, dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Jawa Barat.

5.4 Peran Sektor Pertambangan Mineral Pada PDRB Per Kapita Terhadap Distribusi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

5.4.1 Analisis Kriteria Ekonomi

Dalam kriteria ekonomi, hasil pendugaan pada analisis kriteria ekonometrika dan analisis kriteria statistik dicocokkan dengan analisis kriteria ekonomi dan kesesuaian kondisi sosial yang terjadi pada ruang lingkup penelitian. Kesesuaian model dengan kriteria ekonomi dilihat dari tanda parameter dugaan. Nilai elastisitas pertumbuhan per kapita sektor pertambangan mineral ditunjukkan pada Tabel 4.22 yang merupakan hasil pengolahan data dengan bantuan program *Gretl* untuk melihat nilai peran distribusi antarsektor ekonomi tersebut terhadap Provinsi Jawa Barat. Nilai koefisien sektor pertambangan mineral sebesar 5,6027 yang bertanda positif (+) dengan std. Error sebesar 0,392, artinya indikasi koefisien tersebut menerangkan bahwa sektor pertambangan mineral berperan terhadap distribusi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat namun memiliki tingkat kesalahan penduga sebesar 0,39 %

(persen), Walaupun masih kalah bersaing dengan sektor industri, nilai koefisien sebesar 0,04 (+) dengan std. error sebesar 0,0021 % (persen), artinya nilai koefisien menunjukkan tingkat kesalahan penduga yang lebih kecil dari sektor pertambangan mineral.

Nilai penduga tersebut diinterpretasikan kedalam analisis ekonomi, bahwa elastisitas sektor pertambangan mineral mempengaruhi distribusi pendapatan per kapita dengan tingkat kesalahan penduga < koefisien antarsektor ekonomi lainnya. Elastisitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,1657 (+) positif yang artinya sektor tersebut berperan dalam distribusi pendapatan antarsektor di Provinsi Jawa Barat sehingga meningkatkan jumlah pendapatan per kapita dengan tingkat kesalahan penduga sebesar 0,0139 % (persen).

Elastisitas sektor pertambangan mineral sebesar 5,6027 bernilai positif (+) yang artinya sektor tersebut berperan terhadap distribusi pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat dengan tingkat kesalahan penduga sebesar 0,392 % (persen).

Elastisitas sektor pengolahan industri sebesar 0,0447 bernilai positif (+) yang artinya sektor tersebut berperan dalam distribusi pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat kesalahan penduga sebesar 0,0021 % (persen).

Elastisitas sektor listrik, gas kota dan air bersih sebesar 0,5985 bernilai positif (+) yang artinya sektor tersebut berperan dalam distribusi pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat kesalahan penduga sebesar 0,038 % (persen).

Elastisitas sektor bangunan/konstruksi sebesar 0,4310 bernilai positif (+) yang artinya sektor tersebut berperan dalam distribusi pendapatan antarsektor di Provinsi Jawa Barat sehingga meningkatkan jumlah pendapatan per kapita dengan tingkat kesalahan penduga sebesar 0,021 % (persen).

Elastisitas sektor perdagangan besar, eceran, hotel dan restoran sebesar 0,0784 bernilai positif (+) yang artinya sektor tersebut berperan dalam distribusi

pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat kesalahan penduga sebesar 0,035 % (persen).

Elastisitas sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,2327 bernilai positif (+) yang artinya sektor tersebut berperan dalam distribusi pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Barat sehingga meningkatkan jumlah pendapatan per kapita dengan tingkat kesalahan penduga sebesar 0,012 % (persen).

Elastisitas sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 0,5758 bernilai positif (+) yang artinya sektor tersebut berperan dalam distribusi pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Barat sehingga meningkatkan jumlah pendapatan per kapita dengan tingkat kesalahan penduga sebesar 0,035 % (persen).

Elastisitas sektor jasa-jasa sebesar 0,2037 bernilai positif (+) yang artinya sektor tersebut berperan dalam distribusi pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat kesalahan penduga sebesar 0,012 % (persen).

Dengan demikian, sektor pertambangan mineral mempengaruhi pendapatan distribusi di Provinsi Jawa Barat dan antarsektor ekonomi lainnya. Dari koefisien tenaga kerja antarsektor yang diperoleh bernilai negatif (-), hal itu menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah tenaga kerja antarsektor maka pendapatan per kapita akan semakin kecil atau menurun. Pada koefisien nilai UMR bernilai positif (+), yang artinya bahwa Upah Minimum Regional (UMR) antarsektor sangat mempengaruhi besar pendapatan per kapita yang diperoleh tenaga kerja antarsektor ekonomi yang berbeda-beda.

5.4.2 Analisis Peran Sektor Pertambangan Mineral Terhadap Distribusi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Peran sektor pertambangan mineral dari hasil analisis menggunakan metode Ekonometrika menunjukkan hasil yang berpengaruh pada Rasio Gini. Hal tersebut artinya bahwa sektor pertambangan mineral terdapat peran yang berpengaruh

namun masih kecil perannya terhadap distribusi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga sektor pertambangan mineral termasuk kedalam sektor yang penyerapan tenaga kerjanya kategori rendah namun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bila dilihat dari kontribusi sektor pertambangan mineral terhadap PDRB Jawa Barat.

Pendapatan per kapita antarsektor selalu berbanding sama dengan pendapatan per kapita regional. Apabila pendapatan per kapita antarsektor mengalami penurunan maka pendapatan per kapita regional juga menurun, sehingga perlu memperbaiki ketertinggalan pendapatan daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita antarsektor dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang meningkat maka akan menurunkan distribusi pendapatan antarsektor atau terjadinya distribusi yang tidak merata karena hanya pemilik modal yang dapat memperoleh pendapatan tinggi. Namun apabila pendapatan perkapita dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang menurun maka distribusi pendapatan per kapita akan meningkat.

Provinsi Jawa Barat dengan distribusi pendapatan per kapita yang tidak merata menyebabkan distribusi sektor pertambangan mineral dan sektor listrik, gas kota dan air bersih lebih kecil daripada sektor ekonomi lainnya, sehingga terjadi ketimpangan karena adanya faktor modal yang lebih dominan dan jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit menyebabkan apabila keuntungan yang diterima meningkat maka keuntungan tersebut hanya berpihak pada pemilik modal, sehingga pekerja buruh lainnya hanya menerima pendapatan yang kecil. Namun pada dasarnya seluruh sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat berperan dalam distribusi perekonomian terhadap pendapatan di daerah tersebut.

5.5 Konvergensi Indeks PDRB Per Kapita

Konvergensi ekonomi regional Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam perkiraan daerah yang mencapai titik konvergen pada kurun waktu sekitar 30 taun ke depan. Berikut data konvergensi indeks PDRB/kapita Provinsi Jawa Barat yang disajikan dalam Tabel 5.1 s/d Tabel 5.3 serta grafik indeks konvergensi pada Gambar 5.7 di bawah ini.

Tabel 5.1
Data Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2015

Kab/Kota	Penduduk					
	2010*	2011	2012	2013**	2014	2015
01. Bogor	4.771.932	4.915.320	5.058.709	5.202.097	5.345.485	5.488.874
02. Sukabumi	2.341.409	2.363.745	2.386.081	2.408.417	2.430.753	2.453.089
03. Cianjur	2.171.281	2.189.292	2.207.302	2.225.313	2.243.324	2.261.334
04. Bandung	3.178.543	3.254.187	3.329.831	3.405.475	3.481.119	3.556.763
05. Garut	2.404.121	2.436.884	2.469.647	2.502.410	2.535.173	2.567.936
06. Tasikmalaya	1.675.675	1.690.491	1.705.307	1.720.123	1.734.939	1.749.755
07. Ciamis	1.532.504	1.535.536	1.538.568	1.541.600	1.544.632	1.547.664
08. Kuningan	1.035.589	1.037.989	1.040.389	1.042.789	1.045.189	1.047.589
09. Cirebon	2.067.196	2.075.822	2.084.449	2.093.075	2.101.701	2.110.328
10. Majalengka	1.166.473	1.167.817	1.169.161	1.170.505	1.171.849	1.173.193
11. Sumedang	1.093.602	1.104.110	1.114.617	1.125.125	1.135.633	1.146.140
12. Indramayu	1.663.737	1.666.719	1.669.701	1.672.683	1.675.665	1.678.647
13. Subang	1.465.157	1.475.733	1.486.310	1.496.886	1.507.462	1.518.039
14. Purwakarta	852.521	867.681	882.841	898.001	913.161	928.321
15. Karawang	2.127.791	2.160.322	2.192.852	2.225.383	2.257.914	2.290.444
16. Bekasi	2.630.401	2.754.305	2.878.208	3.002.112	3.126.016	3.249.919
17. Bandung Barat	1.510.284	1.536.450	1.562.615	1.588.781	1.614.947	1.641.112
17a. Pangandaran				386.228	772.456	1.158.684
18. Kota Bogor	950.334	971.229	992.124	1.013.019	1.033.914	1.054.809
19. Kota Sukabumi	298.681	303.061	307.442	311.822	316.202	320.583
20. Kota Bandung	2.394.873	2.416.083	2.437.293	2.458.503	2.479.713	2.500.923
21. Kota Cirebon	296.389	298.169	299.948	301.728	303.508	305.287
22. Kota Bekasi	2.334.871	2.413.380	2.491.888	2.570.397	2.648.906	2.727.414
23. Kota Depok	1.738.570	1.813.107	1.887.645	1.962.182	2.036.719	2.111.257
24. Kota Cimahi	541.177	551.115	561.053	570.991	580.929	590.867
25. Kota Tasikmalaya	635.464	640.868	646.272	651.676	657.080	662.484
26. Kota Banjar	175.157	176.673	178.190	179.706	181.222	182.739
Jawa Barat	43.053.732	43.816.088	44.578.443	45.340.799	46.877.624	48.026.209

Keterangan : *) SP 2010 Jawa Barat Dalam Angka 2012, **) Jawa Barat Dalam Angka 2014
Sumber : Anonim (s), Tahun 2014, Jawa Barat Dalam Angka.

Tabel 5.2
PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2015 (Juta Rupiah)

Kab/Kota	PDRB (Juta Rupiah)						
	2009*	2010*	2011***	2012	2013	2014	2015
01. Bogor	66.083.789	73.800.700	83.032.460	95.905.600	109.670.400	125.061.597	131.564.800
02. Sukabumi	17.264.686	18.595.068	20.160.894	21.612.470	23.950.810	27.312.078	28.732.306
03. Cianjur	16.737.740	18.435.750	20.573.047	22.267.600	24.893.210	28.386.735	29.862.845
04. Bandung	41.262.099	46.092.239	51.291.763	57.071.410	64.660.450	73.734.929	77.569.145
05. Garut	22.271.424	24.844.610	27.491.630	30.147.120	33.635.240	38.355.626	40.350.118
06. Tasikmalaya	11.914.003	12.771.907	13.931.810	15.002.510	16.728.170	19.075.809	20.067.752
07. Ciamis	15.841.183	17.572.448	19.344.956	15.612.130	17.428.810	19.874.778	20.908.266
08. Kuningan	8.179.328	9.131.570	10.018.855	11.028.960	12.249.820	13.968.966	14.695.352
09. Cirebon	17.718.740	19.170.710	20.982.832	22.806.010	25.564.620	29.152.371	30.668.294
10. Majalengka	8.994.427	10.157.419	10.994.066	11.969.770	13.344.030	15.216.738	16.008.008
11. Sumedang	11.188.168	12.265.684	13.531.778	14.923.720	16.582.850	18.910.095	19.893.420
12. Indramayu	41.956.488	46.409.619	53.044.751	57.984.660	63.480.250	72.389.099	76.153.332
13. Subang	14.767.393	15.894.711	17.120.524	18.559.470	19.940.310	22.738.743	23.921.157
14. Purwakarta	14.156.385	15.957.021	17.295.516	19.229.170	22.048.340	25.142.615	26.450.031
15. Karawang	48.283.356	58.884.170	67.159.368	71.321.440	81.682.680	93.146.067	97.989.662
16. Bekasi	89.735.793	97.526.722	107.853.286	119.339.820	134.548.290	153.430.862	161.409.267
17. Bandung Barat	15.847.974	17.543.649	19.354.913	21.721.240	24.675.240	28.138.175	29.601.360
17a. Pangandaran				5.567.880	6.202.820	7.073.327	7.441.140
18. Kota Bogor	11.904.600	13.908.900	15.487.254	17.323.336	19.535.009	22.276.561	23.434.943
19. Kota Sukabumi	4.394.807	5.175.324	5.921.024	6.658.050	7.513.540	8.567.994	9.013.530
20. Kota Bandung	70.281.163	82.002.176	95.612.863	111.121.551	130.209.649	148.483.334	156.204.467
21. Kota Cirebon	9.877.195	10.931.430	12.117.055	13.266.900	14.698.150	16.760.895	17.632.462
22. Kota Bekasi	31.475.388	35.679.065	40.528.808	45.783.161	51.879.660	59.160.476	62.236.821
23. Kota Depok	14.063.920	16.144.730	17.913.310	17.913.313	20.001.733	22.808.786	23.994.843
24. Kota Cimahi	11.683.705	12.845.602	14.164.831	15.543.474	17.294.463	19.721.577	20.747.099
25. Kota Tasikmalaya	7.769.682	8.469.036	9.274.755	10.151.833	11.231.628	12.807.880	13.473.890
26. Kota Banjar	1.592.877	1.769.539	1.948.592	2.136.567	2.399.907	2.736.711	2.879.020
Jawa Barat	625.246.313	701.979.799	786.150.941	871.971.177	986.052.093	1.124.435.118	1.182.905.745

Keterangan : *) SP 2010 Jawa Barat Dalam Angka 2012, ***) Kompilasi dan Analisis PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Sumber : Anonim (s), Tahun 2014, Jawa Barat Dalam Angka.

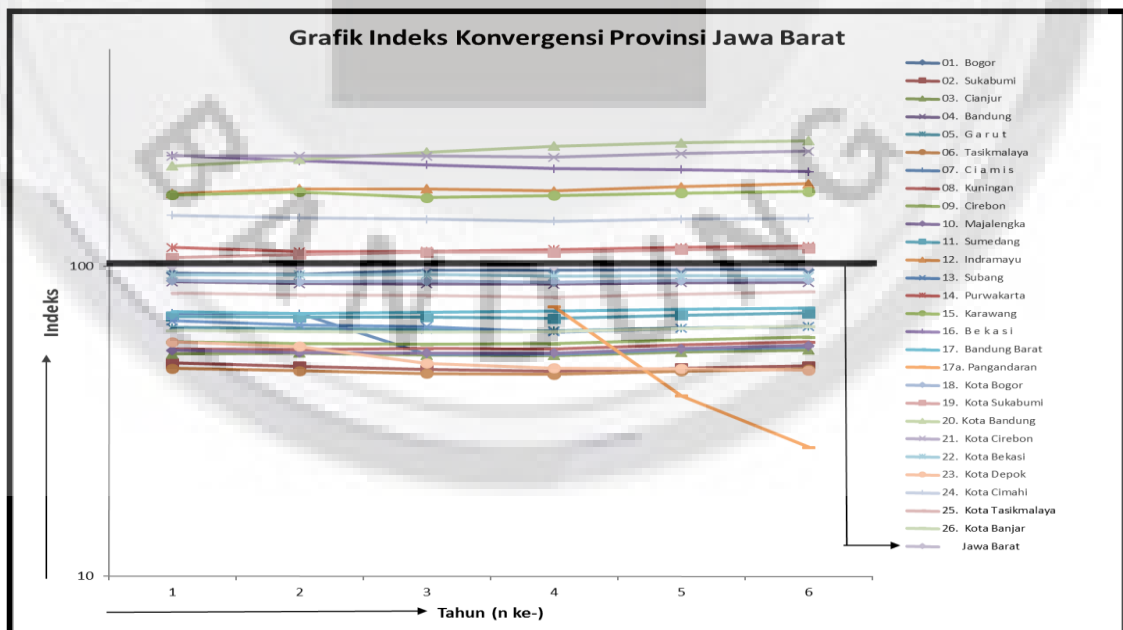
Tabel 5.3
PDRB PerKapita (Juta Rupiah) dan Indeks

Kab/Kota	PDRB PerKapita (Juta Rupiah)						INDEKS					
	2010*	2011***	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
01. Bogor	15,46558	16,89258	18,95851	21,08196	23,39574	23,96936	95	94	97	97	98	97
02. Sukabumi	7,94183	8,52922	9,05773	9,94463	11,23606	11,71270	49	48	46	46	47	48
03. Cianjur	8,49073	9,39712	10,08815	11,18639	12,65387	13,20585	52	52	52	51	53	54
04. Bandung	14,50106	15,76177	17,13943	18,98720	21,18139	21,80892	89	88	88	87	88	89
05. Garut	10,33418	11,28147	12,20706	13,44114	15,12939	15,71305	63	63	62	62	63	64
06. Tasikmalaya	7,62195	8,24128	8,79754	9,72498	10,99509	11,46889	47	46	45	45	46	47
07. Ciamis	11,46649	12,59818	10,14718	11,30566	12,86700	13,50956	70	70	52	52	54	55
08. Kuningan	8,81775	9,65218	10,60080	11,74717	13,36501	14,02778	54	54	54	54	56	57
09. Cirebon	9,27377	10,10820	10,94103	12,21391	13,87084	14,53248	57	56	56	56	58	59
10. Majalengka	8,70780	9,41420	10,23791	11,40023	12,98524	13,64482	53	52	52	52	54	55
11. Sumedang	11,21586	12,25583	13,38910	14,73867	16,65159	17,35688	69	68	68	68	69	70
12. Indramayu	27,89480	31,82585	34,72757	37,95115	43,20022	45,36590	171	177	178	175	180	184
13. Subang	10,84847	11,60137	12,48695	13,32119	15,08412	15,75794	67	65	64	61	63	64
14. Purwakarta	18,71745	19,93304	21,78101	24,55269	27,53361	28,49233	115	111	111	113	115	116
15. Karawang	27,67385	31,08767	32,52451	36,70500	41,25316	42,78194	170	173	166	169	172	174
16. Bekasi	37,07675	39,15808	41,46323	44,81788	49,08192	49,66562	227	218	212	206	205	202
17. Bandung Barat	11,61613	12,59717	13,90057	15,53093	17,42359	18,03738	71	70	71	71	73	73
17a. Pangandaran			16,06000	9,15693	6,42206		0	0	0	74	38	26
18. Kota Bogor	14,63580	15,94604	17,46086	19,28395	21,54586	22,21724	90	89	89	89	90	90
19. Kota Sukabumi	17,32726	19,53738	21,65630	24,09561	27,09555	28,11608	106	109	111	111	113	114
20. Kota Bandung	34,24072	39,57350	45,59220	52,96298	59,87924	62,45873	210	221	233	244	250	254
21. Kota Cirebon	36,88204	40,63826	44,23062	48,71325	55,22396	57,75694	226	226	226	224	230	234
22. Kota Bekasi	15,28096	16,79338	18,37288	20,18352	22,33393	22,81898	94	94	94	93	93	93
23. Kota Depok	9,28621	9,87989	9,48977	10,19362	11,19879	11,36519	57	55	49	47	47	46
24. Kota Cimahi	23,73642	25,70213	27,70411	30,28850	33,94834	35,11298	146	143	142	139	142	143
25. Kota Tasikmalaya	13,32733	14,47218	15,70830	17,23499	19,49212	20,33844	82	81	80	79	81	83
26. Kota Banjar	10,10259	11,02935	11,99041	13,35463	15,10140	15,75485	62	61	61	61	63	64
Jawa Barat	16,30474	17,94206	19,56038	21,74757	23,98661	24,63042	100	100	100	100	100	100

Keterangan : *) SP 2010 Jawa Barat Dalam Angka 2012, ***) Kompilasi dan Analisis PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

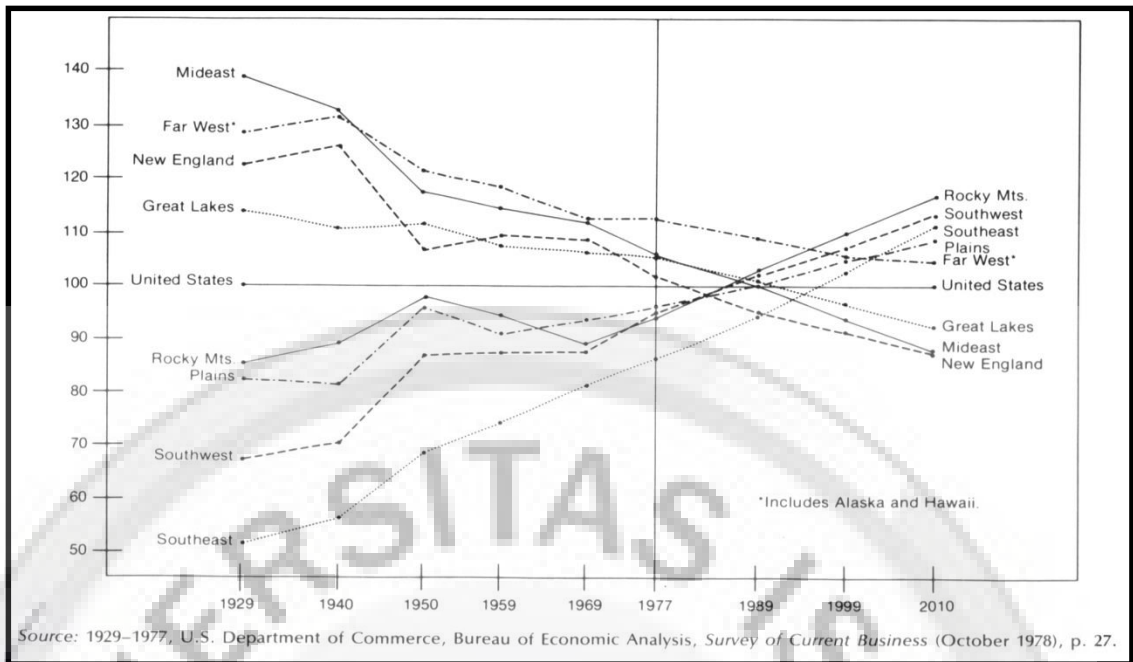
Sumber : Anonim (n), Tahun 2014, Jawa Barat Dalam Angka.

Hasil pengolahan pada Tabel 5.3 diatas, indeks Provinsi Jawa Barat masih belum konvergen. Hal tersebut terlihat pada nilai indeks tiap kabupaten/kota yang relatif <100. Kabupaten/kota dengan nilai indeks surplus >100, yaitu : Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon dan Kota Cimahi. Sedangkan, kabupaten/kota dengan nilai indeks minus <100, yaitu : Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Berikut grafik indeks konvergensi Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2015 pada Gambar 5.7 dan contoh grafik indeks konvergensi di negara Amerika Serikat yang telah mengerucut dan terjadi pemerataan antarwilayah bagiannya pada Gambar 5.8 di bawah ini.



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015.

Gambar 5.7
Grafik Indeks Konvergensi Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2015



Sumber : *Survey Bisnis, 1929-1977, Biro Analisis Ekonomi, Departemen Perdagangan, Amerika Serikat*

Gambar 5.8
Grafik Indeks Konvergensi Amerika Serikat Tahun 1929-1977

5.6 Pengembangan Wilayah Bagi Sektor Pertambangan Mineral Sebagai Konsep Otonomi Daerah

Suatu pembangunan ekonomi yang berarti memperoleh capaian pada nilai tambah dalam kurun waktu tertentu terdapat 2 (dua) nilai tambah pokok yaitu sektoral dan wilayah. Pada nilai tambah sektoral akan memberi dampak pertumbuhan bagi pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB) terhadap perekonomian daerah dan nilai tambah wilayah yang akan memberi dampak manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Dalam laporan kali ini difokuskan pada arti pengembangan wilayah di sektor pertambangan mineral sebagai bagian integral dari pembangunan wilayah regional berkelanjutan. Sedangkan antarsektor regional tersebut merupakan bagian dari pembangunan nasional berkelanjutan.

Dengan konsep pembangunan wilayah pertambangan dalam mengatur sesuatu yang belum ada menjadi sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang bermutunya memajukan, memperbaiki dan meningkatkan secara optimal. Sejak kegiatan

eksplorasi sampai pasca tambang dalam mengoptimalkan kegiatan tersebut maka diperlukan ilmu pengembangan wilayah yang didasari pada batas-batasan sifat laku sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan politik. Sehingga, dengan demikian sasaran pengembangan wilayah untuk menciptakan keseimbangan kemajuan ekonomi antardaerah yang satu dengan yang lainnya dapat mengatasi masalah pemerataan pembangunan ekonomi.

Dalam upaya mengacu pada pengembangan ekonomi di Provinsi Jawa Barat yang termasuk kedalam Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang merupakan kawasan unggul dari Kawasan Timur Indonesia (KTI), perlu ditingkatkan lagi dalam segi perekonomian daerah untuk mendukung kawasan andalan Jawa Barat. Pada dasarnya sektor pertambangan mineral mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah baik penciptaan kesempatan kerja maupun menciptakan keterkaitan ekonomi berupa permintaan akhir antara lain bahan pangan, kebutuhan pengolahan industri, kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya.

Dalam hal ini sektor pertambangan mineral telah mengalami perubahan dan pertumbuhan wilayah dengan adanya transaksi atau penerimaan modal belanja daerah di bidang sumber daya alam cukup baik dengan potensi cadangan dan sumber daya yang cukup besar diantara lain barang tambang logam, nonlogam dan batuan. Walaupun sektor tersebut pengaruhnya tidak lebih besar dari sektor lainnya tetapi sangat menunjang kebutuhan sektor primer dan sekunder seperti : sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan berupa pupuk alami, sektor pengolahan industri berupa barang baku penghasil barang jadi, sektor bangunan/konstruksi berupa bahan campuran beton dan lainnya. Sektor pertambangan mineral pada skala wilayah atau daerah tersebut belum efisien terhadap pertumbuhan (PDRB) Provinsi Jawa Barat, maka perlu meningkatkan jumlah output penggunaan sektor pertambangan mineral.

Sektor pertambangan mineral cukup mendukung peningkatan keterkaitan sektor ekonomi antardaerah yang dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 Provinsi Jawa Barat 11 tahun kebelakang relatif meningkat dengan transaksi antarsektor dan kesempatan kerja yang progresif, artinya bahwa sektor tersebut berperan dalam kegiatan transaksi untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

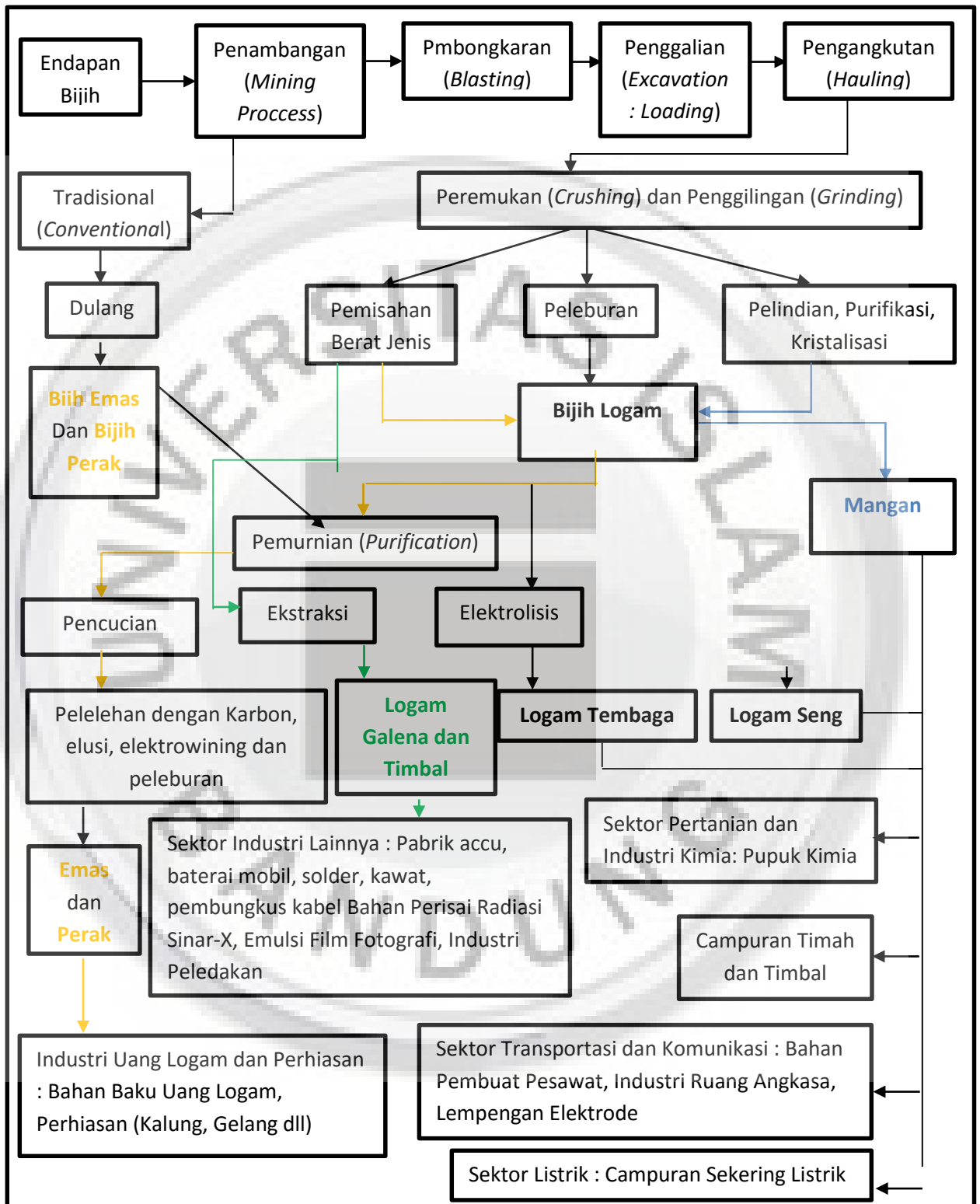
Dalam memperoleh pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat ternyata dari tahun awal pengamatan 2003 sampai akhir pengamatan 2013 hampir setiap tahunnya masih mengandalkan sektor primer yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan serta pertambangan mineral dan sektor sekunder seperti sektor pengolahan industri dan listrik, gas kota dan air bersih yang menjadi sektor andalan dibandingkan sektor tersier. Dalam hal ini sektor primer dan sekunder perlu dikembangkan lagi walaupun sudah memberikan kontribusi pendapatan daerah yang sangat baik, dan juga pada sektor tersier perlu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia agar mampu menciptakan inovasi baru dalam penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mampu mengekspornya. Agar menciptakan peningkatan pembangunan ekonomi daerah, maka daerah tersebut perlu diarahkan pembinaan dan pembangunan antarsektor yang memiliki *value added* atau nilai tambah paling tinggi sebagai acuan dasar sektor dominan agar dapat meningkatkan perdagangan antardaerah maupun antarprovinsi selanjutnya dapat bekerjasama dengan negara tetangga lainnya.

5.7 Pengaruh Pengolahan Mineral Terhadap Nilai Tambah Mineral

Pengaruh pengolahan mineral logam, nonlogam dan batuan akan sangat mempengaruhi pada peningkatan jumlah produk atau jumlah penggunaan barang terhadap bahan baku maupun bahan langsung pakai industri lainnya agar

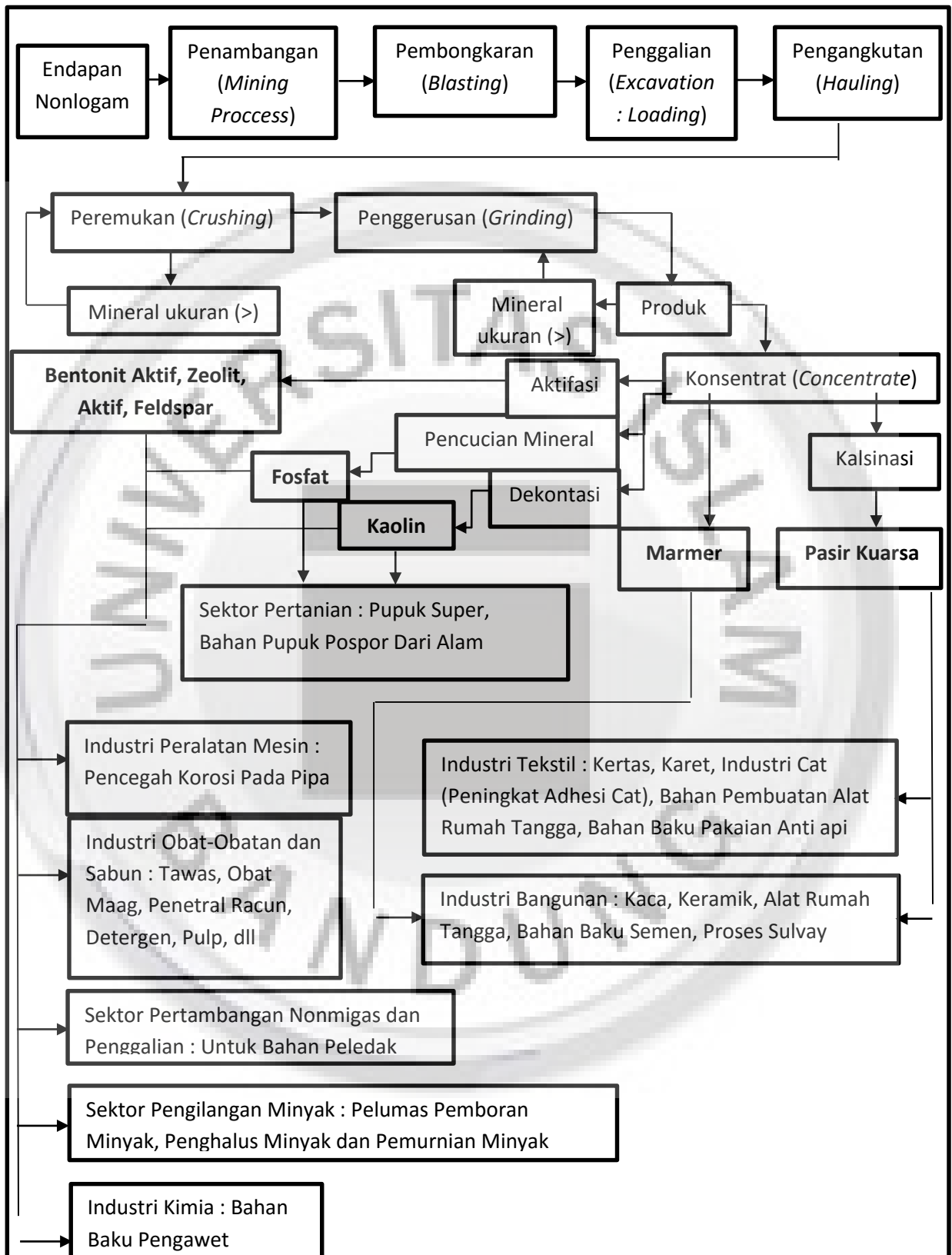
menghasilkan kualitas barang jadi yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Sehingga mineral hasil dari kegiatan penambangan tidak secara langsung dapat digunakan, melainkan diproses lebih lanjut dengan cara mereduksi sehingga menjadi ukuran yang lebih kecil dan dapat diolah ke proses selanjutnya untuk meningkatkan nilai tambah produk yang akan digunakan untuk pembangunan sarana/prasarana di wilayah atau daerah tersebut.

Manfaat nilai tambah tersebut selain meningkatkan jumlah output, juga dapat meningkatkan kesempatan kerja pada proses pengolahan nilai tambah sehingga mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut, contohnya yaitu : kegiatan pengolahan bahan galian di kawasan tambang, kegiatan operasional, pengawasan K3 atau lingkungan hidup dan kegiatan pemantauan dan penyelidikan pengelolaan sumber daya mineral yang banyak membutuhkan tenaga pekerja wilayah sekitar. Manfaat peningkatan nilai tambah juga dapat meningkatkan jumlah produksi barang jadi langsung pakai maupun sebagai bahan baku dan campuran untuk konstruksi bangunan, campuran semen untuk pondasi bangunan, alat rumah tangga, barang perhiasan, sebagai bahan campuran kesehatan dan lain sebagainya. Untuk peningkatan nilai tambah mineral logam, nonlogam dan batuan disarankan seperti pada diagram alir yang di tampilkan pada Gambar 5.8 s/d Gambar 5.10 di bawah ini serta pada Lampiran L.H-162-L.H-168.



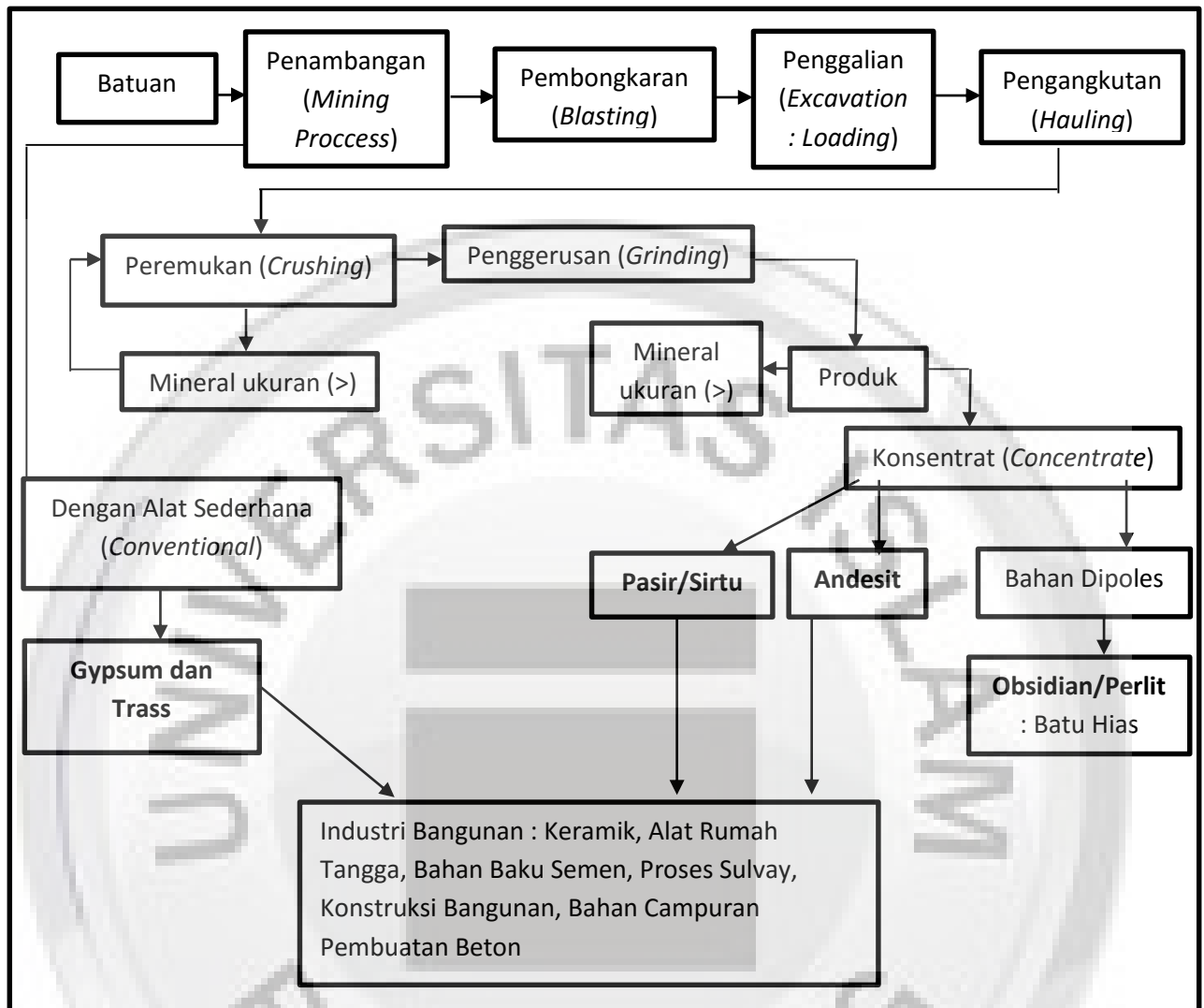
Sumber : Weiss, N.L, Tahun 1990-1994, SME Mineral Processing Handbook.

Gambar 5.8
Pengolahan Nilai Tambah Logam



Sumber : Weiss, N.L., Tahun 1990-1994, SME Mineral Processing Handbook.

Gambar 5.9
Pengolahan Nilai Tambah Nonlogam



Sumber : Weiss, N.L., Tahun 1990-1994, SME Mineral Processing Handbook.

Gambar 5.10
Pengolahan Nilai Tambah Batuan